

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas,Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Arif, Badar Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra AdityaBakti.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, Adami, 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasanya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F dan Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Latief, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi)*, Jakarta, Kreasi Total Media.
- Mahfud, Mohammad, 2011, *perdebatan hukum tatanegara pasca amandemen kontitusi*, Jakarta, rajawali press.
- Marzuki, H.M, 2004, *Pengaduan Konstitusional*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Minarno, Basuki, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, edisi II, Kalimantan tengah, Laksbang Mediatama.

- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moeljatno, 1999, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*,
Cetakan Kedua puluh, Jakarta, Bumi Aksara.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, terbitan
kelima, Jakarta, Ghali.
- Prasetyo, Teguh, 2018, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori
Hukum*. Bandung, Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia cetakan ketiga*, Jakarta-Bandung,
Eresco.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian
Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun
1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, t.t, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung,
Sinar Baru.
- Rosadi, Otong, 2012, *Quo Vadis, Hukum Ekologi dan Keadilan
Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat)
Hukum*, Bantul, Thafa Media.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung
Jawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Baru.

- Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.
- Utrecht, E, 1967, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Diponegoro.
- Yunto, Emerson, dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, FH UI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur

Pemerintahan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-PUU/XIV/2016;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003-PUU/IV/2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44-PUU/XI/2013;

JURNAL DAN LAINNYA

Amir Syamsudin, Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi,

Kompas, Kamis, 2 Pebruari 2017.

Barda Nawawi Arief, *Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum*

Materiel Dalam Hukum Pidana, Makalah,

disampaikan Pada Seminar Nasional Aspek

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan

Publik Dan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7

Mei 2004.

Fatkhurohman, *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 1, Maret 2017.

Harjono, 2002, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, penyampaian dalam Seminar Loka Karya RUU MK.

Hasil kajian pakar public, 2017, pusat kajian akuntabilitas keuangan Negara, Jakarta.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf
df diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul :
23.17

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang menyatakan-kerugian-negara-sama-pun-tak-mengikat](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sama-pun-tak-mengikat)/diakses pada tanggal 30/11/2019
pukul 17.30 WIB.

Katadata,*bedakerugiannegarae-KTP*,
[https://katadata.co.id/berita/2017/03/13/kerugian-negara-e-ktp-versi-bpkp-ketuabpk itu-terserah-pengadilan](https://katadata.co.id/berita/2017/03/13/kerugian-negara-e-ktp-versi-bpkp-ketuabpk-itu-terserah-pengadilan), diakses pada 16 Agustus 2019 pada jam
21.57.

Lihat Fathudin, *Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-*

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1, Juni 2015.

Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 4-2-2004 dalam Amir Syamsuddin et.al. (penyunting), *Putusan Perkara Akbar Tanjung Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.

Pompe mengambil rumusan dari Frank dan von Hippel dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Supandi, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)”.

Waris Anjari, “Penjara terhadap Dokter dalam Perspektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemidanaan Integratif Kajian Putusan Nomor 1110K/Pid.sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol.10, No.1 April 2017.